



Membangun
Masyarakat



Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari
pemegang hak cipta, kecuali mencantumkan
identitas pemegang hak cipta.

Digital Repository Universitas Jember
Purwowibowo
Kusuma Wulandari

Membangun Masyarakat

Dinamika Kekinian
Ilmu Kesejahteraan Sosial



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Purwowibowo & Kusuma Wulandari

Membangun Masyarakat: Dinamika Kekinian Ilmu Kesejahteraan Sosial/
Purwowibowo & Kusuma Wulandari; editor: Rahma Frida—Yogyakarta:
Pandiva Buku, 2023.

x + 218 hlm; 20,5 cm

ISBN: 978-602-5583-98-8

1. Judul

I. Rahma Frida

**MEMBANGUN MASYARAKAT
Dinamika Kekinian Ilmu Kesejahteraan Sosial**

Penulis:

**Purwowibowo
Kusuma Wulandari**

Editor:

Rahma Frida

Perancang Isi:

Agung Damanik

Desain Kover:

Infinite Project

Edisi Pertama: Maret 2023

Pandiva Buku

Anggota IKAPI

MidClass Outlet

Gang Puntodewo No. 164 D, Kanoman, Karangjambe, Banguntapan
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

KATA PENGANTAR

Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai pengetahuan sistematis dan praktis, secara khusus membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dilihat dari dasar keilmuannya, Ilmu Kesejahteraan Sosial mempunyai dasar keilmuan sosial atau 'basic social sciences', yakni psikologi dan sosiologi. Kedua disiplin ilmu ini menyumbang banyak kajian dalam mempelajari Ilmu Kesejahteraan Sosial, meskipun ilmu lainnya, seperti antropologi, ekonomi, politik, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya juga menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dikesampingkan.

Sementara, dari sisi epistemologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial memiliki akar epistemologi yang kuat dari usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Dalam hal ini, praktik dari Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah praktik atau intervensi terkait dengan usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial.

Sebagai ilmu praktis, Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak bermakna apa-apa jikalau hanya dipelajari tanpa melakukan praktik intervensi atau penanganan masalah sosial, yang dapat ditujukan bagi individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa, sebagai bentuk penerapan atau implementasi dari teori yang ada.

Buku *Membangun Masyarakat: Dinamika Kekinian Ilmu Kesejahteraan Sosial* dihadirkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembangunan sosial, pekerja sosial, dan segala dinamikanya yang terjadi belakangan ini. Ditulis oleh akademisi Indonesia, diharapkan buku ini dapat bermanfaat dan melengkapi khazanah bacaan tentang Ilmu Kesejahteraan Sosial di Tanah Air.

Selamat membaca.

Yogyakarta, 17 Februari 2023

Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I - Ilmu Kesejahteraan Sosial.....	1
A. Definisi atau Konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial (Ontologi).....	1
B. Metode dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial (Epistemologi)	2
C. Fungsi/Tujuan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Aksiologi)	3
D. Fokus dan Ruang Lingkup	3
E. Sejarah Ilmu Kesejahteraan Sosial	4
F. Pendekatan Ilmu Kesejahteraan Sosial.....	8
Bab II - Konsep Kesejahteraan Sosial	13
A. Pengertian Kesejahteraan Sosial	13
B. Negara Kesejahteraan	16
Bab III - Konstruksi Teori Ilmu Kesejahteraan Sosial.....	21
A. Pendahuluan	21
B. Tujuan Teori Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Praktik Pekerjaan Sosial	24
C. Perbedaan Budaya dalam Teori Ilmu Kesejahteraan Sosial	32

Bab IV - State of the Art: Ilmu Kesejahteraan Sosial	35
Bab V - Teori Psikodinamik dalam Ilmu	
Kesejahteraan Sosial.....	47
A. Pendahuluan	47
B. Sejarah Psikodinamik.....	48
C. Struktur Kepribadian Manusia.....	49
D. Kepribadian Seseorang.....	49
E. Id, Ego, dan Superego	52
F. Intervensi/Terapi Psikodinamik	56
G. Terapi Psikodinamik dalam Pekerjaan Sosial	58
H. Perlakuan terhadap Klien atau Pasien	59
Bab VI - Teori Pilihan Rasional dalam	
Ilmu Kesejahteraan Sosial.....	61
A. Pendahuluan	61
B. Teori Psikologi dan Perilaku	62
C. Teori Pilihan Rasional	63
D. Teori Pilihan Rasional Terbatas.....	64
E. Asumsi Teori Pilihan Rasional.....	65
F. Teori Pilihan Rasional dan Ilmu	
Kesejahteraan Sosial.....	66
Bab VII - Pengembangan Masyarakat (Community	
Development) dalam Intervensi	
Kesejahteraan Sosial	69
A. Pendahuluan	69
B. Makna Pengembangan Masyarakat/Komunitas.....	70

C. Pengembangan Masyarakat dalam Intervensi Kesejahteraan Sosial.....	71
Bab VIII - Konsep Pembangunan Sosial	
dalam Ilmu Sosial	77
A. Pendahuluan	77
B. Konsep Pembangunan Sosial dalam Disiplin Ilmu Sosial	78
Bab IX - Hubungan Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial	95
A. Pendahuluan	95
B. Kelompok Satu	96
C. Kelompok Kedua	98
D. Kelompok Ketiga	100
Bab X - Ciri Pembangunan Sosial	103
Bab XI - Pembangunan Sosial Melalui Individu	109
A. Pendahuluan	109
B. Pembangunan Sosial/Masyarakat Melalui Pendekatan Individual	110
C. Mendorong Budaya Berwirausaha.....	113
D. Mendorong Tumbuhnya Usaha Kecil.....	121
E. Strategi Memperkuat Individu	133
Bab XII - Pembangunan Sosial Melalui Komunitas/Masyarakat	141
A. Pendahuluan	141
B. Pendekatan Masyarakat/Komunitas	143

C. Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan.....	144
D. Perbedaan Konsep Pembangunan Komunitas/Masyarakat.....	147
E. Kegiatan Komunitas, Partisipasi dan Pembangunan.....	151
F. Perempuan, Gender dan Pembangunan.....	158
Bab XIII - Pembangunan Sosial oleh Pemerintah.....	169
A. Pendahuluan	169
B. Pembangunan Sosial Melalui Perencanaan Terpadu	172
C. Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Pemerataan.....	180
Bab XIV - Pembangunan Berpusat pada Manusia ' dan Pembangunan Berpusat pada Negara	189
A. Pendahuluan	189
B. Pembangunan Berpusat pada Negara dan Pembangunan Berpusat pada Manusia.....	196
C. Kesimpulan.....	213
Daftar Pustaka.....	215
Tentang Penulis	216

BAB I

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan pengetahuan sistematis dan praktis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kemunculan disiplin ilmu kesejahteraan sosial merupakan hasil dari perluasan pokok bahasan bidang pekerjaan sosial.

A. Definisi atau Konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial (Ontologi)

Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu pengetahuan praktis atau ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran, serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan ilmu yang mempunyai dasar keilmuan sosial, yakni psikologi dan sosiologi. Kedua ilmu ini merupakan 'basic social sciences' dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Namun, ilmu lain, seperti antropologi, ekonomi, politik, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya, juga dipelajari dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai bagian tidak terpisahkan (integral) dari ilmu kesejahteraan sosial.

B. Metode dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial (Epistemologi)

Ilmu Kesejahteraan Sosial memiliki akar epistemologi yang kuat dari usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Dalam hal ini, praktik dari Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah praktik atau intervensi terkait dengan usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial.

Dari sisi epistemologi ini, Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai sebuah bangunan keilmuan yang menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan praktik dari intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Dengan demikian, landasan epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah praktik yang esensial dari ilmu ini. Sebagai ilmu praktis, Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak bermakna apa-apa jikalau hanya dipelajari tanpa melakukan praktik intervensi.

Intervensi atau penanganan masalah sosial, bagi individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa, merupakan penerapan atau implementasi dari teori yang ada. Ilmu kesejahteraan dan praktik pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial dapat diibaratkan satu tubuh, atau satu mata uang. Keduanya fungsional kepada yang lain. Teori tanpa praktik tidak ada maknanya, sedangkan praktik tanpa dilandasi teori bisa tersesat (*misleading*).

C. Fungsi/Tujuan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Aksiologi)

Ilmu kesejahteraan sosial dan praktik pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, prinsip pokok dari intervensi yang dilakukan oleh Ilmu Kesejahteraan Sosial agar orang, kelompok, masyarakat, dan bangsa bisa berfungsi sosial. Selain itu, dengan intervensi yang dilakukan oleh ilmu kesejahteraan dan praktik pekerjaan sosial, diharapkan orang, kelompok, masyarakat, dan bangsa dapat mengatasi masalahnya sendiri.

D. Fokus dan Ruang Lingkup

Bila ilmu kedokteran menekankan pada diagnosis dan penyembuhan, yang terkait dengan sakit atau masalah fisik/badan. Ketika seseorang mengalami sakit anggota badannya; sakit paru-paru, misalnya, maka dokter akan memberikan resep untuk mengobati sakit parunya dengan obat yang direkomendasikan. Dengan obat tersebut, sakit fisik berupa sakit jantung akan dapat disembuhkan.

Sedangkan Ilmu Kesejahteraan Sosial terkait dengan sakit psikis atau sakit sosial. Misalnya, menderita, miskin, tidak berdaya, susah, stres, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengobatannya juga menggunakan ilmu terkait dengan sakit psikis tersebut.

Untuk dapat melakukan intervensi dari sisi sosial semacam itu, Ilmu Kesejahteraan Sosial menekankan pada penilaian (*assessment*) dan kemudian melakukan intervensi sosial.

Intervensi sosial merupakan metode perubahan sosial terencana yang bertujuan memfungsikan kembali fungsi sosial seseorang, kelompok, masyarakat, dan bangsa.

Ilmu kesejahteraan sosial menggunakan berbagai pendekatan dan banyak metode intervensi sosial agar orang, kelompok, masyarakat, dan bangsa dapat berdaya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri (*to help themselves*).

Untuk dapat melakukan intervensi yang tepat maka ilmu kesejahteraan sosial memiliki pendekatan dalam lingkup *mikro*, *mezzo*, dan *makro*. Ketiga lingkup pendekatan ini disebut suatu pendekatan holistik.

E. Sejarah Ilmu Kesejahteraan Sosial

1. Sebelum Abad ke-16

Pada mulanya, usaha-usaha kesejahteraan sosial dilakukan oleh kelompok orang yang menggunakan basis nilai sosial, yang disebut dengan usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial berbasis *charity* atau belas kasihan.

Kemudian perkembangan berikutnya, suatu usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial berbasis keagamaan. Usaha-usaha kesejahteraan yang dilakukan pada umumnya merupakan pelayanan sosial yang dilandasi nilai-nilai agama

tertentu. Pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial ini nilai dasarnya bersifat amal.

Harapan dari usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial ini, bagi mereka yang mengerjakannya berharap mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kelak di kemudian hari. Amal kebaikan yang dilakukan dengan motif agar mereka mendapat surga, sebagaimana diperintahkan dalam kitab sucinya masing-masing agama.

Sebagaimana yang dituliskan Canda dan Furman dalam bukunya, *Keberagaman Agama dalam Praktik Pekerjaan Sosial (Spiritual Diversity in Social Work Practice: The Heart of Helping)*, bahwa setiap agama (Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, Kristen, dan Yahudi) memiliki kepercayaan dan nilai dasar yang berimplikasi pada penerapan atau praktik pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial yang mereka lakukan.

2. Abad ke-13–18

Pada periode ini, pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa peraturan perundangan untuk menangani masalah kemiskinan. Intervensinya dalam bentuk kebijakan, yakni Undang-Undang Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth (*Elizabethan Poor Law*).

UU kemiskinan tersebut merupakan salah satu undang-undang yang paling terkenal saat itu. Undang-undang tersebut dianggap sebagai cikal bakal intervensi pemerintah terhadap kesejahteraan warga negaranya karena usaha kesejahteraan

sosial sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh kelompok keagamaan, seperti pihak gereja.

Jika Negara yang melakukan usaha kesejahteraan sosial sebagaimana dalam bentuk kebijakan atau undang-undang maka landasannya bukan lagi belas kasihan (*charity*) atau amal (*philanthropy*), melainkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan atau mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Sebab, Negara dibentuk dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakatnya.

Selain itu, ketika Negara melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan atau UU, sesungguhnya merupakan kewajiban Negara untuk mewujudkan kemakmuran seluruh warga masyarakatnya.

Kemudian usaha-usaha kesejahteraan sosial terus mengalami perkembangan dan kemudian berkembang dengan mendasarkan pada nilai-nilai humanitarianisme, nilai keadilan sosial, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai demokrasi. Bahkan nilai yang berlaku secara universal bagi seluruh bangsa di muka bumi ini, sekarang mendasari usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial.

Selain itu, kemudian muncul kelompok-kelompok (sukarelawan) yang mengupayakan pengembangan usaha kesejahteraan sosial untuk memperbaiki kondisi tersebut. Usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh relawan yang

didasari semangat filantropis atau *charity* maupun nilai-nilai yang disebutkan di atas, dilakukan secara terpadu, terprogram, terarah, dan terorganisasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi sebanyak mungkin orang (*social welfare for all people*).

Di beberapa negara maju, juga Indonesia, pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial terkait dengan para relawan dan organisasi sosial baik lokal, nasional, maupun internasional. Misalnya, UNICEF sebagai salah satu organisasi dunia terkait anak dan pendidikan, UNHCR sebagai organisasi internasional yang terkait dengan pengungsi, dan sebagainya.

3. Tahun 1869

Organisasi relawan bernama Charity Organization Society (COS) didirikan di London, Inggris. Organisasi relawan tersebut dikembangkan untuk menggalang dan mengoordinasikan bantuan dana dan material dari berbagai gereja serta kurang lebih 100 lembaga amal.

Perkembangan organisasi relawan di Inggris berpengaruh pula terhadap perkembangan organisasi relawan di Amerika.

4. Tahun 1877

COS kemudian dikembangkan di Buffalo, New York. Dalam jangka waktu 10 tahun kemudian, terbentuk 25 organisasi sosial di Amerika Serikat.

Berkembangnya berbagai COS di Amerika membuat para relawan aktif yang terlibat di dalamnya merasa perlu suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang berhubungan dengan perilaku individu, serta permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Mary Richmond, seorang praktisi pekerjaan sosial, berencana untuk mengembangkan Sekolah Pelatihan Filantropi Terapan. Lembaga ini menjadi cikal bakal kelas pekerjaan sosial di New York pada tahun 1898.

Perluasan pokok bahasan dalam sejarah perkembangan bidang usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial telah memunculkan suatu kajian kesejahteraan sosial yang lebih luas. Munculnya kajian kesejahteraan sosial ini kemudian mendorong terbentuknya disiplin baru bernama Ilmu Kesejahteraan Sosial.

F. Pendekatan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgley, terdapat empat pendekatan dalam mengupayakan kesejahteraan sosial.

1. Filantropi Sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*), di mana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pelaku dari filantropi disebut sebagai filantropis.

Filantropi sosial bertujuan mempromosikan kesejahteraan sosial dengan mendorong penyediaan barang pribadi dan

pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Ada beberapa karakteristik pendekatan filantropi sosial, di antaranya:

- a. Amal, di mana pendekatan ini tidak memiliki kesinambungan. Artinya, tidak ada lagi interaksi dengan penerima bantuan ketika bantuan selesai diberikan.
- b. Penerima pasif, menggunakan pandangan bahwa masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak melibatkan partisipasi penerima.
- c. Acak, tidak memiliki metode atau tahapan khusus dalam pelaksanaannya.
- d. Kemauan, ketergantungan upaya pada kemauan baik dari para donor dan kemauan pemerintah untuk menggunakan uang pembayar pajak demi mendukung kegiatan-kegiatan amal.

Seiring dengan perkembangan filantropi, filantropi tidak lagi hanya berkaitan dengan penyediaan bantuan kepada yang membutuhkan. Selama abad ke-19, ketika kegiatan amal berkembang dengan cepat di Eropa dan Amerika Utara, beberapa pemimpin filantropis berusaha membawa isu reformasi sosial dan peningkatan kondisi sosial.

Para pemimpin, yang sering berhubungan baik dengan anggota kelas menengah atas, berusaha untuk menggunakan pengaruh mereka untuk menjaring dukungan dari para

pemimpin politik dan bisnis. Mereka menggunakan koneksi yang mereka miliki untuk membujuk pemerintah agar memperkenalkan layanan sosial yang baru, membuat undang-undang yang mencegah eksploitasi dan diskriminasi, atau untuk tindakan perlindungan terhadap kelompok rentan.

2. Pekerjaan Sosial

Berbeda dengan pendekatan filantropi, pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang terorganisasi untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial.

Namun, perkembangan pekerjaan sosial tidak terlepas dari perkembangan filantropi. Sejak abad ke-19, pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi Sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan program sosial pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui penyediaan berbagai pelayanan sosial.

Pendekatan ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Undang-Undang tentang Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth I.

4. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.



BAB II KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial mempunyai banyak arti tergantung sudut pandang yang digunakan.

1. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu keadaan sejahtera (*well-being*) dari seseorang atau kelompok orang. Dalam hal ini merujuk kepada kondisi tercukupinya atau terpenuhinya derajat kesehatan, keamanan, kemakmuran materi, tingkat partisipasi, dan kondisi lainnya yang dialami oleh seseorang dalam masyarakat maupun individu dalam kelompok orang.
2. Pada prinsipnya, kesejahteraan sosial merupakan kondisi bagi semua orang yang memungkinkan untuk mendapatkan atau mengakses tingkat kesejahteraan yang memadai, baik bagi individu maupun kelompok sesuai dengan harkat dan martabat masing-masing. Hal tersebut menyangkut kondisi kekayaan, keamanan, atau partisipasinya, yang semuanya itu dapat diukur dengan jelas.
3. Dalam hal ini kesejahteraan sosial dapat juga diukur dengan kombinasi dari berbagai data statistik, misalnya data tentang distribusi pendapatan, tingkat kematian,

BAB III

KONSTRUKSI TEORI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Saat ini, di masyarakat seluruh dunia, klien berjuang di dalam berbagai lembaga untuk menemui pekerja sosial. Barangkali pekerja sosial mengunjungi kliennya di rumah, atau bekerja dengan kelompok klien, rumah singgah, atau panti-panti, maupun tempat-tempat rehabilitasi.

Di banyak masyarakat, hal demikian dikatakan sebagai pekerja sosial berfungsi. Pekerja sosial cukup menyebar dan berhimpun di dalam ikatan pekerja sosial internasional, menggunakan berbagai bahasa dan literatur pekerjaan sosial sehingga keberadaan mereka tetap ada sampai sekarang.

Pemahaman secara jelas tentang pekerja sosial di berbagai masyarakat memunculkan berbagai pertanyaan. Misalnya, apakah pekerja sosial itu bekerja sendirian?—mengenai hal yang sama, di semua masyarakat? Tulisan ini akan membahas mengenai klien dan pekerja sosial dalam kerangka pekerjaan sosial berdasarkan konteks lembaga sosial masing-masing.

Meskipun bukan merupakan suatu konstruksi atau bangunan baru, kapan pun pekerja sosial dan klien bersama di dalam lembaga yang sama. Di sini dimaksudkan bahwa masing-masing pekerja sosial, klien, dan lembaga sosial terkonstruksi

BAB IV STATE OF ART: ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terdapat beberapa ciri pokok (*state of the art*) Ilmu Kesejahteraan Sosial

1. Ilmu Kesejahteraan Sosial Adalah Ilmu Sosial

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu sosial. Ilmu sosial atau *social science* bisa juga disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, ilmu kesejahteraan sosial merupakan sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya.

Ilmu kesejahteraan sosial berbeda dengan sosiologi dan antropologi, yang keduanya merupakan ilmu murni dan induk ilmu sosial. Ilmu kesejahteraan sosial, dalam melakukan intervensi atau penanganan masalah sosial yang dialami individu, kelompok, dan masyarakat, menggunakan metode ilmiah sebagai strateginya.

Ilmu kesejahteraan sosial juga terus mengembangkan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari masalah yang dialami manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Kedua istilah tersebut juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai masalah sosial yang dihadapi manusia, baik masa sekarang maupun masa depan.

BAB V

TEORI PSIKODINAMIK DALAM ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Teori psikodinamik atau psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, terkait dengan kepribadian seseorang. Intinya adalah mempelajari atau melakukan studi fungsi dan perilaku psikologis manusia.

Pada awalnya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan untuk memahami hubungan Freud dengan para pengikutnya. Namun, kemudian berkembang, bahkan menyimpang jauh dari yang digunakan untuk mempelajari hubungan Freud dengan pengikutnya yang mereka kemudian menyimpang dari ajarannya.

Psikoanalisis atau psikodinamika memiliki tiga penerapan, yaitu; (1) suatu metode penelitian tentang alam pikiran manusia; (2) suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku atau kepribadian manusia; dan (3) suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional dari manusia.

Dalam hal ini, psikoanalisis mencakup setidaknya 20 orientasi teoretis yang sangat luas. Suatu teori yang berusaha

BAB VI

TEORI PILIHAN RASIONAL DALAM ILMU KESEJAHTERAAN

A. Pendahuluan

Teori pilihan rasional secara konsep mengadopsi prinsip terkait dengan asas manfaat atau asas guna dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, manusia merupakan aktor atau makhluk nalar atau logis yang selalu mempertimbangkan semua kegiatannya sesuai cara, tujuan, pilihan, dan manfaat dari apa yang ditentukan berdasarkan pilihan yang rasional.

Sesungguhnya, teori pilihan rasional merupakan metode yang dikemukakan oleh Cornish dan Clarke untuk membantu dalam memikirkan pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh penjahat di Amerika. Selain itu, teori pilihan rasional juga digunakan untuk melakukan intervensi pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial dalam memecahkan masalah sosial secara individual, kelompok, dan masyarakat, di tengah masyarakat.

Secara kronologis, teori pilihan rasional muncul ketika ada suatu hipotesis yang sudah lama terkait dengan suatu eksperimen terhadap kasus kejahatan tertentu di masyarakat. Secara ilmiah menjelaskan bahwa teori pilihan rasional telah

BAB VII PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) DALAM INTERVENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pendahuluan

PBB mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai 'sebuah proses di mana anggota komunitas/masyarakat datang bersama-sama untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi'.

Suatu konsep pengembangan masyarakat yang cukup luas diterapkan pada praktik dalam kehidupan masyarakat, yang semua warga masyarakat terlibat atau berpartisipasi di dalamnya. Secara profesional, masyarakat dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya dari pengembangan masyarakat adalah membangun komunitas lokal yang lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi masalah sosialnya.

Pengembangan masyarakat juga dipahami sebagai suatu disiplin profesional para ahli di bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Hal tersebut didefinisikan oleh Asosiasi

BAB VIII KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM ILMU SOSIAL

A. Pendahuluan

Definisi pembangunan sosial, seperti yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya, hanya salah satu dari banyak definisi yang dipergunakan. Untuk lebih memahami perbedaan konsep yang telah digunakan maka di bawah ini dikemukakan definisi pembangunan sosial sesuai bidang ilmu yang terkait. Hal ini digunakan sebagai pemahaman dari perspektif tertentu serta untuk memperkaya konsep dan definisi pembangunan sosial.

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi dari berbagai disiplin yang berbeda juga memberikan sumbangan dalam merumuskan definisi pembangunan sosial.

Pendekatan ekonomi politik, merupakan salah satu bidang ilmu yang telah memberikan inspirasi tentang pemikiran pembangunan sosial. Selain itu, dikemukakan juga tentang kerangka ilmiah yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan bidang ekonomi dan proses pembangunan sosial.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertinggi usaha kesejahteraan sosial. Selain itu, berbagai karakteristik

BAB IX HUBUNGAN PEMBANGUNAN DAN PEKERJA SOSIAL

A. Pendahuluan

Konsep pembangunan sosial mencapai kepopulerannya di lingkungan praktik pekerjaan sosial di awal tahun 1980-an. Hal itu disebabkan atas usaha kelompok kecil pekerja sosial di Amerika yang tergabung di dalam lembaga internasional atau mereka yang bekerja di negara berkembang.

Publikasi pertama di bidang ini ditulis oleh Frank Faiva (1977), John Jones dan Rama Pandey (1981), serta Daniel Sander (1982). Tulisannya sangat berpengaruh karena mampu mendorong pengembangan pendekatan pembangunan sosial di bidang pekerjaan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.

Meskipun para ahli di bidang pekerjaan sosial berusaha untuk memperkenalkan perspektif pembangunan sosial, banyak definisi pembangunan sosial dapat ditemukan di dalam abstrak atau artikel tentang praktik pekerjaan sosial.

Intinya menawarkan langkah ideal, yakni mewujudkan kesejahteraan dengan suatu bentuk intervensi. Banyak definisi pembangunan sosial dirumuskan oleh pekerja sosial terlalu luas sehingga kurang bermakna. Akibatnya, definisi tersebut tidak jelas seperti apa yang dimaksudkan oleh para ahli di

BAB X

CIRI PEMBANGUNAN SOSIAL

Pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial terencana guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, yakni sebagai suatu proses dinamis dari pembangunan ekonomi.

Sebagaimana definisi resmi lainnya, definisi pembangunan sosial berasal dari penderitaan atau kelemahan. Namun, definisi tersebut berupaya untuk menangkap esensi dari segi pembangunan itu sendiri. Guna memahami lebih lanjut dari definisi pembangunan sosial, di bawah ini dijelaskan ciri-ciri utamanya dari ciri atau kata kuncinya.

Ciri pertama, proses pembangunan sosial adalah suatu proses pembangunan sosial yang tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan aspek unik yang ada di dalam pembangunan sosial jika dibandingkan dengan model pembangunan lainnya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Meskipun demikian, pembangunan sosial hampir sama dengan pendekatan lainnya karena pembangunan sosial memusatkan perhatiannya pada masalah sosial dan mengimplementasikan ke dalam kebijakan sosial dan program

BAB XI PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI INDIVIDU

A. Pendahuluan

Secara taksonomi, ideologi yang ditunjukkan di dalam tulisan pendek ini sangat berguna sebagai dasar untuk mengklasifikasi berbagai strategi yang akan dibahas berikut ini.

Dengan menggunakan pendekatan taksonomi, ada tiga model utama strategi pembangunan masyarakat yang akan dibahas. *Pertama*, strategi pembangunan masyarakat merupakan kunci utama di dalam mendorong peningkatan kapasitas pada individu. *Kedua*, dengan menekankan peran masyarakat lokal untuk menggerakkan pembangunan masyarakat. *Ketiga*, berbagai strategi yang telah dibahas sangat tergantung sepenuhnya kepada 'political will' pemerintah di dalam mendorong terwujudnya pembangunan sosial.

Ketika membahas rencana praktik pembangunan masyarakat, beberapa istilah digunakan, seperti kebijakan, perencanaan, program, proyek, dan strategi. Ketika berbagai terminologi atau konsep tersebut tepat maknanya maka akan dapat digunakan di antara konsep itu secara bergantian.

Kata strategi sudah sering digunakan dalam mengorganisasi suatu kegiatan, khususnya dalam program yang

BAB XII

PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI KOMUNITAS/MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Pandangan bahwa pembangunan masyarakat/komunitas dapat dilaksanakan dengan baik melalui individu itu sendiri yang bekerja secara ekonomis, efisien dengan komunitas lokal, merupakan dasar dari pendekatan komunitas bagi pembangunan masyarakat.

Penganjur strategi ini yakin bahwa individu dan komunitas mempunyai hubungan simbiosis dalam mengorganisasi mereka sendiri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka. Dengan komunitas, masalah mereka dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, dan kesempatan untuk berkembang maju potensinya ada pada masyarakat atau komunitas mereka sendiri.

Selain itu, individu dan masyarakat juga mampu mencapai tujuannya sendiri. Hanya saja mereka membutuhkan koordinasi dengan anggota masyarakat yang lain, dan saling bertukar pikiran/ide dengan yang lain.

Dengan langkah demikian, mereka akan mampu mengontrol sumber daya yang ada pada mereka sendiri (lokal) dan memecahkan masalah lokal yang dihadapinya. Mereka juga

BAB XIII

PEMBANGUNAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH

A. Pendahuluan

Keyakinan terbesar adalah bahwa pembangunan sosial dapat berhasil jika dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa pemerintah mempunyai badan, lembaga, dan berbagai perangkat pembangunan tertentu untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan, perencanaan, dan pengadministrasian yang diperlukan dalam proses pembangunan sosial.

Pembangunan sosial oleh pemerintah ini sering kali disebut dengan pendekatan pembangunan sosial secara statis. Namun, penjabarannya adalah bahwa pembangunan sosial itu merupakan kumpulan ideologi kolektivitas. Dalam ideologi ini, disarankan bahwa adanya suatu keyakinan besar terhadap strategi pembangunan statis ini dapat berhasil jika lembaga pemerintah peduli terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga-lembaga itu bertanggung jawab penuh di dalam meningkatkan kesejahteraan semua warga negaranya. Pendekatan ini yakin bahwa pemerintah sesungguhnya merupakan keseluruhan kelompok-kelompok masyarakat,

BAB XIV PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA NEGARA

A. Pendahuluan

Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua, banyak negara di dunia ini mengalami kehancuran total, terutama hancurnya sarana-sarana industri yang mengalami kalah perang. Sektor industri di dalam suatu negara merupakan 'jantung' dan 'ruh' dari perekonomian suatu negara, dan jika mengalami kehancuran, secara langsung juga menghancurkan perekonomian negara yang bersangkutan.

Amerika yang kala itu tidak mengalami kekalahan, bahkan bisa disebut sebagai 'pemenang' dalam perang dunia kedua tersebut, mengalami kesulitan juga dalam mempertahankan laju pertumbuhannya atau perekonomian makronya. Hal ini disebabkan negara-negara yang kalah sesungguhnya merupakan *partner* perekonomian Amerika, yang industrinya tidak mengalami kerusakan. Dengan terus beroperasinya industri itu justru menjadikan produk-produk Amerika mengalami kesulitan karena pasar di dalam negeri sudah jenuh.

Oleh karena itu, Amerika dan negara yang tidak kalah dalam perang tersebut mempunyai kepentingan untuk membenahi

luas bahwa menangani masalah sosial saat ini merupakan bentuk kesalahan fungsi dari individu itu sendiri. Kemiskinan pada umumnya sebagai tanda kegagalan fungsi individu. Secara umum telah diterima suatu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni berdasarkan atas model perbaikan kemampuan individu untuk menggunakan kesempatan di dalam produktivitas pasar.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa munculnya pekerjaan sosial sesungguhnya berasal dari upaya organisasi amal dan belas kasihan (*charity*). Masyarakat menyisakan masalah dari ketidakmampuan mereka dalam memecahkan masalah kemiskinan mereka sendiri.

Relawan wanita (pekerja sosial) merupakan orang pertama kali sebagai pioner dalam melaksanakan pekerjaan sosial. Mereka menyantuni orang miskin dan memberikan bantuan sosial serta ekonomi agar mereka menjadi ekonomis dan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Awal mulanya, mereka berusaha untuk membantu kliennya menemukan pekerjaan agar mereka dapat mengatasi masalahnya terutama masalah materi, yang hal ini menjadi penghalang munculnya kemampuan dirinya dalam berpartisipasi di dalam ekonomi produktif. Pada waktu itu, mereka menekankan faktor psikologis yang dianggapnya sebagai fungsi klien sebagai anggota masyarakat.

dengan pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi lebih bersifat *top-down*, sedangkan pembangunan sosial menekankan *bottom-up*.

Di dalam konsep pembangunan sosial, yang dimaksud dengan dari bawah tidak lain adalah pemberdayaan masyarakat. Karena individu sebagai bagian dari suatu masyarakat maka dalam pemberdayaan masyarakat, yang paling utama adalah pemberdayaan individu. Oleh karena itu, di dalam hal ini manusia sebagai pusat dari pembangunan atau disebut dengan *people centered development*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Meriam. 1985. *Pengantar Ilmu Politik*. Gramedia Jakarta.
- Cox, David. 2001. 'Materi Workshop Kurikulum Pembangunan Sosial'. Universitas Indonesia.
- Korten, David. 1984. *People-Centered Development*. Kumarian Press.
- Midgley, James. 1995. *Social Development: Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- O'Brien, Martin & Sue Penna. 1998. *Theorising Welfare, Enlightenment and Modern Society*. London Sage Publications.
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory. Second Edition*. Great Britain: Macmillan.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- United Nation Development Program. 1988. 'Pembangunan Manusia (Human Development)'

TENTANG PENULIS



Purwowibowo. Dosen pada Jurusan/Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, Indonesia. Pernah menjadi Ketua Jurusan IKS FISIP Universitas Jember dan peneliti pada Kelompok Riset Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Jember. Penelitian yang banyak dilakukan adalah yang terkait dengan Sosial Kapital. Menyelesaikan pendidikan Magister dari Jurusan Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan Doktor dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjajaran Bandung.



Kusuma Wulandari. Lahir di Bojonegoro pada 1978. Menikah dan dikarunia dua orang anak, putri dan putra. Beralamat di Perumahan Jember Permai 1 Jalan Semeru 1 Blok D No. 3, Jember, Jawa Timur.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN Banjarjo 1 Bojonegoro tahun 1991, SMPN 1 Bojonegoro tahun 1994, dan SMAN 1 Bojonegoro tahun 1997. Pada tahun 2001, penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember (UNEJ). Kemudian melanjutkan studi S-2 Sosiologi Universitas Brawijaya (UB) lulus tahun 2009, dan pada tahun 2022 menyelesaikan studi S-3 Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Riwayat pekerjaan penulis dimulai sejak tahun 2003, diterima sebagai staf pengajar jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember. Pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Ilmu Kesejahteraan

Sosial FISIP UNEJ. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota Asosiasi Pendidik Pekerja Sosial (ASPEKSI). Penulis pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 10 tahun dari Presiden RI pada tahun 2014.

Penulis menghasilkan satu karya buku yang berjudul *Kepemimpinan pada Masyarakat Nelayan*. Sebagai seorang peneliti, penulis sudah banyak melakukan penelitian dan dipercaya oleh BAPPEDA Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2013 sampai sekarang sebagai tenaga ahli untuk mendampingi kajian-kajian yang dilakukan, antara lain: Percepatan MDGS Kabupaten Bondowoso (2013); Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Bondowoso (2014); Analisis IPM Pendidikan di Kabupaten Bondowoso (2015); Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (2016); Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan (2017); Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Kabupaten Bondowoso (2018), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bondowoso (2019); Strategi Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bondowoso (2020); Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bondowoso (2021); Penyusunan Profil Gender Kabupaten Bondowoso (2021); serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bondowoso (2022).

Selain pendamping kajian di Kabupaten Bondowoso, penulis juga pernah sebagai tenaga ahli kajian di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Probolinggo.